

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Salmun¹, Rudin.M², Muhammad Dharma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah. (. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan; (1) Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Biro Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai fasilitator dalam mendukung pelayanan jemaah. Dengan perbaikan berkelanjutan, penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan semakin optimal. (2) Faktor penghambat dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta kendala teknis dan administrasi.

Kata kunci: Manajemen, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Ibadah Haji.

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) to determine and analyze the Hajj Pilgrimage Management at the Central Sulawesi Province People's Welfare Bureau. (2) to determine and analyze the Inhibiting Factors in the Hajj Pilgrimage Management at the Central Sulawesi Province People's Welfare Bureau. (Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study concluded: (1) Hajj Pilgrimage Management at the Central Sulawesi Province People's Welfare Bureau is implemented through the stages of planning, organizing, implementing, and supervising. The People's Welfare Bureau acts as a facilitator in supporting pilgrim services. With continuous improvement, the implementation of the Hajj pilgrimage in Central Sulawesi Province is expected to become more optimal. (2) Inhibiting factors in the Hajj Pilgrimage Management at the Central Sulawesi Province People's Welfare Bureau include limited human resources, suboptimal coordination between agencies, and technical and administrative constraints.

Keywords: *Management, Planning, Organization, Implementation, Supervision, and Hajj Pilgrimage.*

A. PENDAHULUAN

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan upaya sistematis untuk memastikan seluruh proses haji bagi jemaah berjalan lancar, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses manajemen mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian tugas dan koordinasi antarinstansi, pelaksanaan pelayanan dan pendampingan jemaah, serta pengawasan untuk memastikan kualitas layanan. Keberhasilan penyelenggaraan haji dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti regulasi yang jelas, komitmen aparatur, dan kerja sama lintas sektor, serta dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala

administrasi, dan kebutuhan peningkatan koordinasi agar pelayanan jemaah lebih optimal.¹

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Tengah memainkan peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk ibadah catering di asrama haji, PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji), transportasi Palu ke Balikpapan pergi pulang. Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah juga sering kali bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan jemaah haji, serta memfasilitasi berbagai kegiatan manasik dan persiapan keberangkatan. Peran Biro Kesra dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi: (a) Perencanaan dan Koordinasi seperti ; Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan ibadah haji di tingkat daerah, termasuk penyusunan jadwal, anggaran, dan persiapan lainnya. (b) Manasik Haji: Mereka seringkali menjadi fasilitator kegiatan manasik haji, baik yang diselenggarakan secara rutin maupun menjelang keberangkatan. (c) Fasilitasi Keberangkatan yaitu Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah membantu jemaah haji dalam hal persiapan keberangkatan, seperti proses administrasi, pemberian informasi, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Tengah membantu pemerintah daerah dalam; (a) Pengawasan yaitu Mereka juga mengawasi pelaksanaan ibadah haji di daerah, termasuk

¹ Hutomo, Y. T., & Fathurahman, H. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Menggunakan Model Hajjsequal Pada Jemaah Haji Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1).

kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah. (b) Evaluasi: Setelah pelaksanaan ibadah haji, Biro Kesra biasanya melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan haji, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tingkat Daerah Biro Kesra juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah, termasuk pengelolaan dana haji, bantuan bagi jemaah, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Penyelenggara Haji sebagai lembaga yang ada dalam satu wadah Biro Kesra Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tentu perlu memenuhi tuntutan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bersifat jasa. Berbagai kebijakan dan petunjuk operasional pelaksanaan pelayanan di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kecamatan dicantumkan melalui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji No.13 Tahun 2008. Dalam hal ini yang perlu ditangani dan mendapat perhatian khusus adalah bidang penyelenggaraan haji, yang mengingat semakin banyak peningkatan masyarakat mendaftar ibadah haji. Melihat hal tersebut tentu perlu adanya tindakan secara representatif dan berkesinambungan, mengingat semakin banyaknya calon jemaah haji yang datang untuk meminta informasi seputar haji maka semakin ekstra pula kinerja yang harus dilakukan. Tentu harus diperhatikan agar penyelenggaraan haji yang diberikan dapat

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.²

Berdasarkan penelitian awal di Biro Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji umumnya terkait dengan kurangnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya, yang berdampak pada kualitas pelayanan haji bagi jemaah. Permasalahan ibadah haji di Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah secara umum mencakup beberapa aspek, seperti Kapasitas dan Ketersediaan Kuota: Sulawesi Tengah memiliki jumlah peminat haji yang tinggi, sementara kuota haji yang dialokasikan oleh pemerintah mungkin tidak mencukupi. Ini bisa menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang lama untuk jemaah. Persiapan dan Edukasi Jemaah: Pastikan jemaah mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang tata cara ibadah haji, persiapan fisik dan mental, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan keberangkatan. Pendanaan dan Biaya: Biaya haji yang cukup tinggi menjadi masalah bagi sebagian jemaah, terutama yang memiliki kondisi ekonomi terbatas. Biro Kesra perlu memberikan bantuan dan dukungan untuk membantu jemaah yang kesulitan.³

Fenomena penyelenggaraan ibadah haji di Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan yaitu ; (a) Sumber Daya seperti keterbatasan anggaran dan SDM di Biro Kesra juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan haji. Hal ini dapat berdampak pada kualitas

² Muhamad, I. A., & Putri, K. P. K. (2025). Bimbingan Manasik Dalam Meningkatkan Mutu Ibadah Haji Dan Umrah Pada Jama'ah Kbihu Qubbatul Muttaqin Sukabumi. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(3), 550-558.

³ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900

pelayanan, seperti kualitas makanan, kebersihan, dan keamanan di pemondokan. (b) Pelayanan Jemaah: Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada pelayanan jemaah haji, seperti ketidaknyamanan transportasi, pemondokan, dan katering. Selain itu, jemaah juga bisa mengalami kesulitan memahami tata cara ibadah haji, yang dapat berdampak pada kualitas ibadah mereka. Biro Kesra memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar dan berkualitas. Namun, keterbatasan sumber daya dan koordinasi dapat menghambat tugas mereka dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah?
- 2) Bagaimana faktor penghambat dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada permasalahan yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Manajemen Penyelengaran Haji.

⁴ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

⁵ Ibid

D. PEMBAHASAN

Sejarah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan. Keberadaan Biro Kesejahteraan Rakyat tidak dapat dipisahkan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

Secara historis, pembentukan Biro Kesejahteraan Rakyat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berawal dari kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki unit kerja yang secara khusus menangani urusan kesejahteraan masyarakat. Pada masa awal pembentukan pemerintahan daerah, urusan kesejahteraan rakyat masih tergabung dalam struktur birokrasi yang sederhana dan belum terfokus. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial dan keagamaan di masyarakat, pemerintah daerah memandang perlu adanya lembaga yang secara khusus mengoordinasikan dan memfasilitasi program-program kesejahteraan rakyat.⁶

Dalam perkembangannya, Biro Kesejahteraan Rakyat dibentuk sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kedudukan Biro Kesra berada langsung di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

⁶ Sabrina Uswa Bela Haq (artikel 2020), Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020, Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Daerah. Posisi strategis ini menunjukkan bahwa Biro Kesra memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat di lapangan. Keberadaan Biro Kesra dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pada tahap awal pembentukannya, ruang lingkup tugas Biro Kesejahteraan Rakyat masih relatif terbatas dan lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan seremonial serta fasilitasi bantuan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan tuntutan masyarakat, tugas dan fungsi Biro Kesra mengalami perluasan. Biro Kesra tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai perumus kebijakan teknis dan koordinator lintas sektor dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Perubahan signifikan dalam peran dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat terjadi seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk urusan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Biro Kesra dituntut untuk lebih responsif dan inovatif dalam merespons kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun geografis.

Dalam perjalanan sejarahnya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah mengalami beberapa kali penyesuaian struktur organisasi dan nomenklatur sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi agar

mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Meskipun mengalami perubahan struktur, esensi tugas Biro Kesra tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan di bidang keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.⁷

Salah satu bidang tugas penting yang secara konsisten dijalankan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat adalah fasilitasi kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, pelayanan keagamaan memiliki arti strategis mengingat karakteristik masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, Biro Kesra diberi tanggung jawab untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan, baik melalui koordinasi dengan instansi vertikal seperti Kementerian Agama maupun melalui dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah.

Selain bidang keagamaan, Biro Kesejahteraan Rakyat juga berperan dalam pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran ini diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan sosial, bantuan kepada lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, serta dukungan terhadap program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kesra senantiasa berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah juga semakin

⁷ Sabrina Uswa Bela Haq (artikel 2020), Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020, Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kompleks. Globalisasi, dinamika sosial, serta perkembangan teknologi informasi menuntut Biro Kesra untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Biro Kesra tidak lagi hanya dituntut untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu berperan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, Biro Kesejahteraan Rakyat terus berupaya memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan sistem perencanaan program, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, Biro Kesra diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sejarah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah mencerminkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang. Dari sebuah unit kerja dengan fungsi terbatas, Biro Kesra telah berkembang menjadi lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Ke depan, Biro Kesejahteraan Rakyat diharapkan terus beradaptasi dan berinovasi agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah yang semakin kompleks. (<https://ppid.sultengprov.go.id>).

1. Analisis Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki karakteristik khusus karena menyangkut kepentingan keagamaan, sosial, serta tanggung jawab negara terhadap warga negara yang melaksanakan rukun Islam kelima. Kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji menuntut adanya manajemen yang efektif dan terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam aspek koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pelayanan jamaah haji di tingkat daerah.⁸

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah dapat dianalisis melalui pendekatan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

a. Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Perencanaan merupakan tahap awal dan fundamental dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan perencanaan dengan

⁸ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

mengacu pada regulasi dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Perencanaan ini mencakup penetapan program kegiatan, alokasi anggaran, serta penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan jamaah haji.⁹

Dalam perencanaan tersebut, Biro Kesra berperan dalam menyiapkan dukungan anggaran daerah untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, seperti fasilitasi transportasi jamaah, akomodasi sementara sebelum keberangkatan, serta kegiatan seremonial pelepasan dan penyambutan jamaah haji. Selain itu, perencanaan juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan instansi keamanan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan jamaah haji dapat terpenuhi secara terpadu.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan ibadah haji masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama dalam perencanaan, sehingga tidak semua kebutuhan pelayanan jamaah dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, perubahan kebijakan pusat yang bersifat dinamis, seperti perubahan kuota jamaah atau regulasi teknis penyelenggaraan haji, sering kali memerlukan penyesuaian perencanaan di tingkat daerah dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menuntut fleksibilitas

⁹ Shihab, M. Quraish. 2012. Haji & Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur. Tangerang: Lentera Hati.

dan kemampuan adaptasi Biro Kesra dalam menyusun perencanaan yang responsif.

b. Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Fungsi pengorganisasian dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antarunit kerja yang terlibat. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan fungsi pengorganisasian dengan membentuk struktur kepanitiaan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat provinsi. Struktur ini melibatkan berbagai instansi lintas sektor, baik dari unsur pemerintah daerah maupun instansi vertikal.¹⁰

Dalam pengorganisasian tersebut, Biro Kesra berperan sebagai koordinator utama yang menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji. Pembagian tugas dilakukan secara formal melalui surat keputusan dan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan. Pemerintah kabupaten/kota juga dilibatkan dalam pengorganisasian, khususnya dalam pendataan jamaah, pembinaan manasik, dan pelayanan di tingkat lokal.

Meskipun secara struktural pengorganisasian telah berjalan dengan baik, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota. Hal ini terkadang menyebabkan kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber

¹⁰ Abdul Halik, (Tesis 2020). Pelayanan Calon Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020

daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pelayanan haji juga menjadi tantangan dalam pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji.

c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pelaksanaan merupakan tahap di mana seluruh rencana dan struktur organisasi diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada pemberian fasilitasi dan dukungan kepada jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan tertib. Pelaksanaan kegiatan meliputi fasilitasi keberangkatan dan pemulangan jamaah haji, penyediaan sarana transportasi dari daerah asal menuju embarkasi, serta penyediaan akomodasi sementara.¹¹ Biro Kesra juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pendampingan medis. Selain itu, pembinaan mental dan spiritual jamaah dilakukan melalui kegiatan manasik haji yang dilaksanakan bersama Kementerian Agama.

Namun, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji masih ditemukan berbagai kendala. Beberapa jamaah mengeluhkan keterbatasan fasilitas pendukung dan keterlambatan jadwal kegiatan. Faktor geografis Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah luas dan kondisi infrastruktur yang belum merata turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan haji. Jamaah yang berasal dari daerah terpencil memerlukan perhatian dan

¹¹ Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa. 1985

penanganan khusus, terutama dalam hal transportasi dan akomodasi.

Selain itu, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Keterbatasan jumlah petugas yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pelayanan haji menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen haji memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan profesional.

d. Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.¹²

Pengawasan dilakukan baik secara administratif maupun operasional. Pengawasan administratif mencakup pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan pengawasan operasional dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, mekanisme pengawasan yang ada masih memiliki keterbatasan.

¹² Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. Pedoman Haji. Semarang: PT. Pustaka

Pengawasan cenderung bersifat internal dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi jamaah sebagai pengguna layanan. Padahal, umpan balik dari jamaah haji sangat penting untuk mengetahui secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu dikembangkan.

Dari perspektif manajemen publik, penyelenggaraan ibadah haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah mencerminkan upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, koordinasi, dan pelayanan publik. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek transparansi dan kualitas pelayanan. Faktor pendukung dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah, serta pengalaman penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta dinamika kebijakan nasional yang berdampak langsung pada pelaksanaan di daerah.¹³

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa manajemen penyelenggaraan ibadah haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam

¹³ Choliq MT, Abdul. 2011. *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa

pelayanan haji menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hutomo, Yoga Tri; Fathurahman, Heri (2025), Analisis Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Menggunakan Model Hajjsequal Pada Jemaah Haji Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2024 bagi jemaah haji di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan menggunakan model Hajjsequal meliputi lima dimensi yaitu kesehatan, pembinaan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya. Untuk semua dimensi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar kepuasan jemaah haji dapat meningkat. Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti penyelenggaraan jemaah haji. Perbedaan penelitian yaitu Model Hajjsequal Pada Jemaah Haji.

2. Analisa Faktor Penghambat dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Faktor-faktor penghambat tersebut muncul pada setiap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Keberadaan faktor penghambat ini perlu dianalisis

secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan manajemen penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah. Faktor penghambat utama dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah pada dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Keterbatasan anggaran daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan ibadah haji masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada terbatasnya fasilitas dan pelayanan yang dapat diberikan kepada jamaah haji, seperti penyediaan akomodasi sementara, transportasi, serta kegiatan pembinaan jamaah. Dalam tahap perencanaan, keterbatasan anggaran menyebabkan Biro Kesejahteraan Rakyat harus melakukan prioritas program, sehingga tidak semua kebutuhan jamaah dapat diakomodasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keuangan menjadi faktor krusial yang memengaruhi kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji.¹⁴

2. Keterbatasan sumber daya manusia

Selain keterbatasan anggaran, faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan petugas yang tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang teknis pelaksanaan haji serta kemampuan komunikasi dan pelayanan publik. Di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi

¹⁴ Handoko, T. Hani, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta

Tengah, jumlah aparatur yang secara khusus memiliki pengalaman dan pelatihan di bidang manajemen haji masih terbatas. Akibatnya, beban kerja menjadi tinggi dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah. Keterbatasan SDM ini juga berdampak pada fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam situasi yang memerlukan respons cepat terhadap permasalahan di lapangan.

3. Kurangnya koordinasi lintas sektor

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak instansi, seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, aparat keamanan, serta pemerintah kabupaten dan kota. Dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat ego sektoral dan perbedaan persepsi mengenai tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Kurangnya koordinasi ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, keterlambatan pengambilan keputusan, serta kurang sinkronnya pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks manajemen, lemahnya koordinasi menjadi penghambat utama dalam fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.¹⁵

4. Kebijakan Pemerintah Pusat

Faktor penghambat lain yang cukup signifikan adalah dinamika kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan. Kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji, seperti penetapan kuota jamaah, jadwal keberangkatan, dan regulasi teknis lainnya, ditentukan oleh pemerintah pusat dan bersifat mengikat bagi pemerintah daerah. Perubahan kebijakan yang terjadi dalam waktu singkat sering kali menyulitkan Biro Kesejahteraan Rakyat

¹⁵ Hadi, Abdul. 2002. Menuju Kesucian Hati. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah. Kondisi ini menuntut fleksibilitas tinggi dari aparatur, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan ketidaksiapan dalam pelaksanaan di lapangan.¹⁶

5. Kondisi Geografis Provinsi Sulawesi Tengah

Selain faktor kebijakan, kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi faktor penghambat dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang luas, dengan kondisi infrastruktur yang belum merata, menyulitkan proses pelayanan jamaah, terutama yang berasal dari daerah terpencil dan kepulauan. Jamaah dari wilayah tersebut memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk mencapai titik kumpul atau embarkasi, sehingga menambah kompleksitas pengelolaan transportasi dan akomodasi. Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan ibadah haji secara merata dan adil.

6. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi

Dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data jamaah, serta mempermudah koordinasi antarinstansi. Namun, di tingkat daerah, pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menyebabkan proses administrasi masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan data dan keterlambatan pelayanan. Rendahnya

¹⁶ Alim Syaiful. 2018, Menuju Umroh dan Haji Mabru (Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, Penertib Laksana, Yogyakarta

pemanfaatan teknologi informasi juga berdampak pada kurang optimalnya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dari aspek pengawasan, faktor penghambat yang dihadapi adalah terbatasnya mekanisme evaluasi berbasis partisipasi jamaah. Pengawasan yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat masih bersifat internal dan administratif. Padahal, masukan dan umpan balik dari jamaah haji sebagai pengguna layanan sangat penting untuk menilai kualitas pelayanan secara objektif. Keterbatasan mekanisme pengaduan dan evaluasi berbasis jamaah menyebabkan beberapa permasalahan pelayanan tidak teridentifikasi secara optimal. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya fungsi pengawasan sebagai sarana perbaikan berkelanjutan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji.¹⁷

7. Faktor budaya organisasi

Faktor ini juga turut menjadi penghambat dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Pola kerja birokrasi yang cenderung kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam situasi tertentu, prosedur administratif yang panjang menjadi kendala dalam merespons kebutuhan jamaah secara cepat dan tepat. Budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

¹⁷ Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa. 1985

Peneliti berpendapat

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa faktor penghambat dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah bersifat multidimensional, meliputi aspek keuangan, sumber daya manusia, koordinasi, kebijakan, geografis, teknologi informasi, pengawasan, dan budaya organisasi. Keberadaan faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan memahami faktor-faktor penghambat tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi jamaah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

E. KESIMPULAN

1. Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan jamaah haji daerah. Pengorganisasian melibatkan berbagai instansi terkait guna mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Pelaksanaan pelayanan haji mencakup pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor penghambat dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta kendala teknis dan administrasi. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kepada jemaah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan koordinasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

F. Saran

1. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan koordinasi teknis dan komunikasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang jelas serta pelatihan teknis guna meminimalkan kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

4. Diperlukan penguatan sistem koordinasi dan pengawasan antarinstansi terkait agar hambatan teknis dan administrasi dapat diminimalkan serta pelayanan kepada jemaah haji menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halik, (Tesis 2020). Pelayanan Calon Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020.
- Afifuddin, Al-Baqir, Muhammad. 2000. Al-Ghazali Keajaiban-Keajaiban Hati. Bandung:
- Adnan, M. Anis. 2013. Sisi Lain Perjalanan Haji. Semarang: Syiar Media Publishing.
- Ahmad Nidjam dan. Latif Hanan, 2006, *Manajemen Haji* (Cetakan. IV; Mediacita,.
- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa. 1985
- Alim Syaiful. 2018, Menuju Umroh dan Haji Mabrur (Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, Penertib Laksana, Yogyakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004, Departemen Agama RI Jakarta: 2004
- Aqilla, Umi. 2013. Panduan Praktis Haji & Umrah. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. Pedoman Haji. Semarang: PT. Pustaka

- Bungin, Burhan. 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Choliq MT, Abdul. 2011. Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Departemen Agama RI. 2003. Panduan Perjalanan Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2006. Haji dari Masa ke Masa. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Departemen Agama RI. 2007.
- Faisal, Sanapiah, 2013 *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi, Abdul. 2002. Menuju Kesucian Hati. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. Ali. 2001. Tuntunan Haji. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. Hani, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Hadoko, Hani. T. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. 2009
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Hutomo, Y. T., & Fathurahman, H. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Menggunakan Model Hajjsequal Pada Jemaah Haji Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1).

- Jalaludin Rakhmat, 2012, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Cetakan V Bandung: Mizan, 2012)
- Khoirunnisa, Nadea Nurul (artkel 2022), Perspektif Masyarakat dan Pegawai Penyelenggara Haji Umrah Kementerian Agama Kabupaten Magelang Terkait Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Tesis Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*. Jakarta: Paramadina.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Buku 1 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Muhamad, I. A., & Putri, K. P. K. (2025). Bimbingan Manasik Dalam Meningkatkan Mutu Ibadah Haji Dan Umrah Pada Jama'ah Kbihu Qubbatul Muttaqin Sukabumi. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(3), 550-558.
- Nurul Ulfatih dan Teguh Triwiyanto. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres. 2016
- Qardhawi, Yusuf. *Konsep Ibadah Dalam Islam*. Cet.Ke 2. Mizan, Bandung :Mizan, 2002.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI, Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian. Agama RI, 2019).
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial

DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5),
3663-3674

Sabrina Uswa Bela Haq (artikel 2020), Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020, Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shariati Ali. Ibadah Haji. Pustaka. Bandung. 2009. Cetakan ke 4

Shihab, M. Quraish. 2012. Haji & Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur. Tangerang: Lentera Hati.

Sihab, Quraish. Wawasan al-Quran. Jakarta: PT Mizan Pustaka. 2007

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011

Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016

Sukayat, Tata. 2016. Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Sunarto, 2005, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Cetakan. I; Jakarta: Raja . Grafindo Persada.

Supriyanto, Marno dan Trio. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008

Sutrisno, Edy, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.

Zahro, A., Afifudin, A., & Hardaningtyas, R. T. (2025). Analisis Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Minat Nasabah dalam Menjalankan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Lawang-Malang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01).